

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBERDAYAAN KOLABORATIF ANAK JALANAN DI YAYASAN INTAN MAHARANI PALEMBANG

Oleh:

Masayu Adiah¹, Lies Nur Intan², Fitri Herdayani³, Rita Junita⁴, Supardi⁵, Syahri^{6*}

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tamansiswa Palembang

¹masayu.adiah70@gmail.com

²liesnurintan2020@gmail.com

³fitriherdayani@gmail.com

⁴junitarita@gmail.com

⁵supardi@unitaspalembang.ac.id

⁶syahri99@gmail.com

Abstrak

Anak jalanan menjadi salah satu masalah di perkotaan, termasuk di kota Palembang. Jumlah anak jalanan semakin bertambah dari waktu ke waktu sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk melakukan upaya penyelesaian tersebut, maka dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, salah satu pihak yang berperan penting adalah organisasi masyarakat sipil, yakni Lembaga swadaya masyarakat. Yayasan Intan Maharani merupakan salah satu Organisasi Masyarakat Sipil yang memiliki perhatian serius untuk melakukan pembinaan anak jalanan di Kota Palembang. Untuk membantu peningkatan peran mereka maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan, yaitu penguatan kolaboratif pembinaan anak jalanan. Kegiatan dilakukan dengan metode curah pendapat dan diskusi. Pimpinan dan staf yayasan memahami tentang pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan, melakukan analisis dukungan dan sumber daya serta merancang rencana tindak lanjut melakukan kolaborasi. Dari hasil workshop tersebut maka Yayasan Intan Maharani memiliki kemampuan untuk membangun jaringan pemangku kepentingan yang lebih luas sehingga akan meningkatkan perannya dalam isu-isu kemiskinan perkotaan, termasuk anak jalanan.

Kata Kunci: anak jalanan, kolaboratif, pembinaan, pemangku kepentingan

Abstract

Street children are one of the problems in urban areas, including in the city of Palembang. The number of street children is increasing from time to time, so comprehensive and sustainable efforts are needed to resolve the problem. To make these efforts, the involvement of many parties is required, one of the parties that plays an important role is civil society organizations, namely non-governmental organizations. The Intan Maharani Foundation is one of the Civil Society Organizations that has a serious concern for fostering street children in the city of Palembang. To help improve their role, this community service activity was carried out, namely, strengthening the collaborative fostering of street children. The activity was carried out using the brainstorming and discussion method. The leaders and staff of the foundation understand the importance of collaboration with stakeholders, conducting analysis of support and resources, and designing follow-up plans for cooperation. From the results of the workshop, the Intan Maharani Foundation can build a wider stakeholder network so that it will increase its role in urban poverty issues, including street children.

Keywords: street children, collaborative, coaching, stakeholders

PENDAHULUAN

Masalah anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial di perkotaan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya anak jalanan. Banyak studi di berbagai kota di

Indonesia bahwa secara umum ada 3 (tiga) faktor utama, yaitu kemiskinan, kohesivitas keluarga, dan lingkungan terutama pengaruh kelompok sebaya. Aktifitas yang dilakukan anak jalanan cukup beragam, antara lain meminta-minta, mengamen, jualan asongan, tukang semir, cari barang bekas dan lain-lain.

Mereka melakukan aktifitas tersebut dengan alasan membantu ekonomi orang tua, ingin memperoleh uang sendiri, dipaksa membantu ekonomi orang tua, mengikuti teman, tidak betah di rumah, dan karena ingin hidup bebas (Walopka *et al.*, 2018); (Mugianti *et al.*, 2018); (Herlina, 2014); (Setiawan *et al.*, 2023).

Kota Palembang, sebagai kota metropolis juga menghadapi masalah anak jalanan. Jumlah anak jalanan dari waktu ke waktu terus bertambah. Berdasar data Dinas Sosial (hasil penangkapan saat Razia) jumlah anak jalanan tahun 2022 sebanyak 55 anak. Untuk tahun 2023 sebanyak 66 anak. Kondisi lapangan secara kualitatif jumlahnya mungkin lebih banyak. Mengingat tidak semua anak jalanan tertangkap ketika dilakukan Razia.

Pemerintah kota terus berupaya untuk melakukan pembinaan dan/atau pemberdayaan anak jalanan. Namun demikian, masalah anak jalanan tetap belum dapat teratasi dengan baik. Hasil penelitian Syahri *et al* (2023); Pertiwi *et al* (2021) menunjukkan bahwa tata kelola pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan bersifat sporadis, temporer dan belum terintegrasi. Dengan tatakelola demikian, maka pembinaan yang dilakukan kurang efektif dan tidak berkelanjutan dalam mengatasi masalah anak jalanan. Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas belum terjadi, baik antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun dengan Organisasi Non Pemerintah (LSM, Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, serta Dunia Usaha).

Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PkM) ini dilakukan sebagai upaya menjembatani terjadinya kolaborasi antara masyarakat sipil dengan Pemerintah Kota Palembang. Masyarakat sipil yang menjadi penerima manfaat PkM adalah Yayasan Intan Maharani (YIM). YIM merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki perhatian dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang. Salah satu kendala yang dihadapi YIM adalah lemahnya dalam melakukan advokasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota. Untuk memperkuat upaya ini, maka dilakukan workshop pengembangan pembinaan kolaboratif dengan pemangku kepentingan untuk anak jalanan di Kota Palembang.

METODE

Tujuan PkM yang dilakukan adalah untuk memfasilitasi pimpinan dan staf

Yayasan Intan Maharani Palembang agar memiliki pengetahuan dan kemampuan praktis melakukan identifikasi, analisis dan rumusan aksi untuk pengembangan kolaborasi pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di sekretariat yayasan, yakni di Jalan Mayor Salim Batubara Lorong Pendopo No. 164F Sekip Ujung Palembang. Metode kegiatan adalah ceramah, diskusi dan kerja kelompok. Ada 2 (dua) tahap untuk mencapai tujuan PkM. Tahap pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan identifikasi dan analisis. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan dengan metode ceramah, diskusi dan kerja kelompok. Tahap kedua adalah melakukan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan praktif menyusun rumusan aksi kolaborasi pembinaan anjal. Pendampingan ini dilakukan selama 3 (tiga) hari berturut-turut setelah kegiatan pertemuan dilakukan. Metode yang digunakan adalah diskusi dan praktik menyusun rumusan rencana aksi Yayasan untuk melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Peserta workshop sebanyak 7 (tujuh) orang, yakni ketua, sekretaris, koordinator bidang rehabilitasi, koordinator bidang pemberdayaan masyarakat dan 1 (satu) orang staf bidang pemberdayaan dan 2 orang staf bidang rehabilitasi. Untuk mengukur tingkat ketercapaian PkM yang dilakukan adalah dengan terumuskannya rencana aksi Yayasan untuk melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik Organisasi Pemerintah Kota maupun dunia bisnis dan Organisasi Masyarakat Sipil yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Singkat OMS

Yayasan Intan Maharani merupakan lembaga swadaya masyarakat yang secara legal telah berdiri cukup lama. Berdasar akta yang ada, lembaga didirikan pada tanggal 30 Agustus 1994 Notaris Robert Tjahjaindra, SH, MBA dengan nomor akta 313, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor 14/1994/Y tertanggal 8 Oktober 1994. Seiring dengan perubahan perundang-undangan tentang yayasan, maka dilakukan perubahan akta. Berdasar Akta Notaris –PPAT Merliansyah, SH., M.Kn Nomor 44 tanggal 02 Oktober

2015 dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0017625.AH.01.04 Tahun 2015.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yayasan adalah 01.669.446.5-306.000. Yayasan Intan Maharani juga terdaftar di Dinas Sosial Kota Palembang sebagai LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial). Surat tanda pendaftaran LKS Nomor 467/STPLKS/0027/DPMPSTP-PPK/2024. Surat tanda pendaftaran ini diperpanjang setiap 2 (dua) tahun.

Visi lembaga adalah menjadi lembaga swadaya yang mandiri dan terpercaya dalam berkontribusi untuk pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat marginal (rentan). Dengan misi;

- a. Melaksanakan pendidikan dalam arti luas, terutama pada kelompok masyarakat marginal (rentan).
- b. Melaksanakan kajian dan advokasi kebijakan, utamanya untuk mendorong kepedulian dan keberpihakan semua pihak terhadap kelompok masyarakat marginal (rentan).
- c. Melakukan fasilitasi dan pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi dan kesehatan kelompok masyarakat marginal (rentan).
- d. Melakukan penyebaran informasi tentang pemberdayaan masyarakat sebagai pembelajaran semua pihak.

Tahun 2024 sejumlah program dikerjakan Yayasan, antara lain; program eliminasi HIV-AIDS untuk komunitas beresiko tinggi (Transgender, LSL, Pekerja Seks Perempuan, Pengguna Napza) dan pendampingan terhadap orang dengan HIV (ODHIV). Selain itu juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan.

Untuk pembinaan anak jalanan dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Palembang. Secara kejasama program dengan Dinas Sosial telah berakhir di tahun 2022. Namun upaya untuk melakukan pembinaan oleh yayasan terus dilanjutkan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh yayasan. Bentuk pembinaan yang dilakukan berupa pemeriksaan kesehatan dan pemberian edukasi hidup sehat. Kegiatan ini bekerjasama dengan salah satu Puskesmas yang ada di Palembang. Selain itu juga melakukan pendataan keluarga dari anak jalanan untuk difasilitasi memperoleh Jaminan

Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Persoalan yang terjadi untuk mendapatkan KIS-PBI adalah keluarga dari anak jalanan kurang peduli terhadap administrasi kependudukan, seperti kesalahan yang ada di Kartu Keluarga, belum memiliki KTP elektronik, Tulisan nama yang tidak sinkron antar data identitas kependudukan dengan yang lain. Persoalan ini menjadi kendala untuk memperoleh KIS-PBI bagi keluarga miskin.

Adanya komitmen Yayasan Intan Maharani untuk melakukan pemberdayaan terhadap komunitas marginal, maka PKM ini mencoba untuk ikut memikirkan bagaimana mencari jalan keluar mengatasi berbagai kendala dalam pembinaan anak jalanan. Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah perlunya berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lebih luas mendorong kepedulian dan keterlibatan mereka.

Kegiatan Fasilitasi

Membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan tidaklah sederhana dan mudah. Chris Ansell dan Alison Gash (2007) memberikan kerangka pemikiran tentang bagaimana tatakelola kolaboratif dibangun. Persoalan anak jalanan, tidak hanya masalah ekonomi, tetapi juga terkait dengan aspek lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, integrasi keluarga, dukungan masyarakat dan lain sebagainya. Karena memiliki dimensi yang sangat kompleks dan luas, maka melakukan pembinaan dan pemberdayaan butuh keterlibatan banyak pihak.

Dalam rangka memberikan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun langkah-langkah untuk melakukan advokasi kepada semua pihak untuk diajak bersama-sama memiliki komitmen dan keterlibatan dalam pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan di Kota Palembang. Dalam kerangka memberikan pemahaman hal tersebut materi ini disampaikan kepada peserta workshop.

Pada awalnya peserta diberi pemahaman tentang bagaimana memahami konsep pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya anak jalanan. Selain itu juga pemahaman bagaimana hubungan antara negara dengan masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam konteks pemberdayaan masyarakat.



Gambar 1. Diskusi Pemetaan Pengaruh dan Kepedulian Pemangku Kepentingan untuk Pembinaan Anak Jalanan

Selanjutnya, untuk melakukan identifikasi pemangku kepentingan peserta workshop dibagi menjadi 2 (dua) kelompok. Satu kelompok beranggotakan 3 (tiga) orang dan kelompok lainnya 4 (empat) orang. Setiap kelompok diberi satu lembar kertas plano dan spidol. Waktu mengerjakan selama 30 menit.

Tugas yang diberikan adalah; (1) melakukan identifikasi sebanyak mungkin pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan; (2) masing-masing pemangku

kepentingan dipetakan ke dalam 4 (empat) kuadran pada gambar 2.

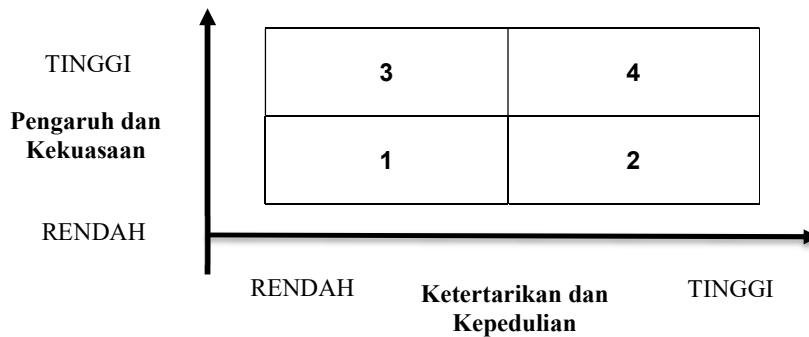
Penjelasan kuadran:

Kuadran 1: Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh atau kekuasaan rendah dan juga memiliki kepedulian dan ketertarikan rendah terhadap pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan.

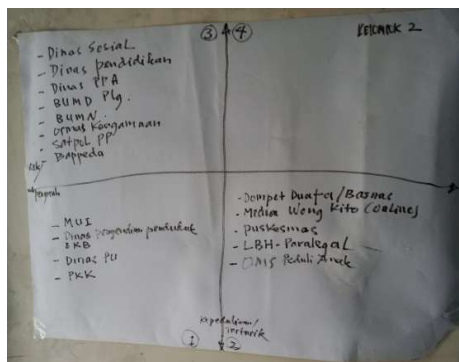
Kuadran 2: Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh atau kekuasaan rendah tetapi memiliki kepedulian dan ketertarikan yang tinggi terhadap pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan.

Kuadran 3: Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh atau kekuasaan tinggi tetapi memiliki kepedulian dan ketertarikan yang rendah terhadap pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan.

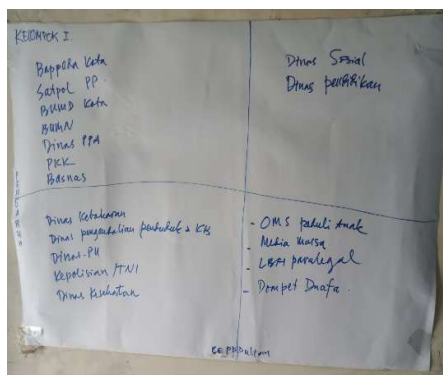
Kuadran 4: Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh atau kekuasaan tinggi dan memiliki kepedulian dan ketertarikan yang tinggi pula terhadap pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan.



Gambar 2. Kerangka Analisis Pemetaan Potensi Pengaruh atau Kekuasaan dan Ketertarikan atau Kepedulian Pemangku Kepentingan



Gambar 3. Hasil Diskusi Kelompok tentang Analisis Pengaruh dan Kepedulian untuk Pembinaan Anak Jalanan



Gambar 4. Hasil Diskusi Kelompok tentang Analisis Pengaruh dan Kepedulian untuk Pembinaan Anak Jalanan

Hasil kerja kedua kelompok seperti pada gambar 3 dan 4. Masing-masing kelompok diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok satu mempresentasikan terlebih dahulu dan kelompok kedua menanggapi. Demikian juga sebaliknya.

Terpetakannya Lembaga Pemerintah, Dunia Usaha dan Organisasi Masyarakat Sipil dengan menggunakan model kwadran relasi antara kewenangan dan/atau kekuasaan terhadap kepedulian dan/atau ketertarikan terhadap persoalan anak jalanan menjadi satu indikasi bahwa tujuan PkM menunjukkan adanya keberhasilan. Diskusi yang menarik dan memperoleh perhatian adalah apa peran masing-masing pemangku kepentingan, terutama pemangku kepentingan yang berada di kwadran 3 (tiga). Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kekuasaan tinggi tetapi tingkat kepedulian dan dukungannya rendah. Lembaga yang terpetakan pada

kwadran ini antara lain Badan Usaha Milik Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PKK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BUMN, Satpol PP, Kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Pemangku kepentingan pada kwadran 3 sangat strategis dan penting dalam mendukung kesuksesan pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan. Bagaimana melakukan advokasi dan membangun kesadaran pentingnya keterlibatan mereka dalam upaya pembinaan anak jalanan menjadi tantangan bagi Organisasi Masyarakat Sipil. Misalnya, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, diantara kedua kelompok memberikan posisi yang berbeda. Satu kelompok ada pada kwadran 3 dan kelompok lainnya ada di kwadran 4. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun kedua dinas tersebut sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang besar mengatasi masalah anak jalanan, tetapi peran dan fungsinya belum optimal dan dibutuhkan untuk advokasi lebih lanjut.

Kwadran 2 memperlihatkan bahwa Organisasi Masyarakat Sipil ternyata berperan besar terhadap pembinaan anak jalanan. Jenis OMS yang terlibat antara lain berbentuk NGO atau LSM, Media Massa, LBH dan Dompot Dhuafa. Dengan kenyataan demikian, maka dibutuhkan adanya dukungan semua pihak. Dukungan ini penting agar peran OMS bisa berkesinambungan dan komprehensif dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat marginal.

Sesi terakhir adalah mendiskusikan penyusunan rencana kerja yang bisa dilakukan dan prioritas untuk melakukan advokasi terhadap pemangku kepentingan yang ada di dalam kwadran tiga. Langkah yang dilakukan adalah; (1) melakukan identifikasi pemangku kepentingan yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan; (2) melakukan analisis dengan bantuan kerangka analisis tentang tingkat komitmen dan peran strategis masing-masing pemangku kepentingan; (3) penyusunan rencana kerja berdasar komitmen dan peran strategis pemangku kepentingan dan (4) menghimpun dukungan sumber daya, termasuk menjadi mitra strategis.

Hasil PkM sebagaimana diuraikan di atas memperkuat teori Kolaboratif Governance (Ansell & Gash, 2007) bahwa siklus tata kelola kolaboratif yang berhasil, berkembang ketika forum kolaborasi mencapai keberhasilan yang bisa

memperdalam kepercayaan, komitmen dan pemahaman bersama. Dalam tataran praksis sejalan dengan penelitian (Ogunkan, 2025) bahwa anak jalanan memiliki keragaman latar belakang dan aktivitas. Oleh karena itu kepekaan terhadap keragaman tersebut sangat penting menjadi perhatian dalam mengembangkan program intervensi. Inklusivitas program juga tidak gampang karena stigmatisasi terhadap anak jalanan juga sangat kuat (Julien, 2024).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan fasilitasi pembinaan kolaboratif anak jalanan di Organisasi Masyarakat Sipil Yayasan Intan Maharani telah memberikan pemahaman pada pimpinan dan staf manajemen tentang pentingnya melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha maupun Organisasi Masyarakat lainnya. Selain itu juga telah memberikan ketrampilan dalam melakukan analisis situasi sebagai bahan melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan. Pemahaman tersebut diindikasikan dengan adanya kemampuan peserta kegiatan melakukan pemetaan pemangku kepentingan ke dalam perangkat analisis yang disiapkan.

Saran

Saran pengembangan lebih lanjut adalah perlu dilakukan kegiatan PKM yang memfokuskan pada penyusunan peta jalan (*roadmap*) dan pendampingan advokasi terhadap OMS. Bagi Yayasan Intan Maharani perlu mengembangkan kemampuan analisis yang lebih mendalam dan terinci tentang tata kelola kolaboratif kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dengan tata kelola kolaboratif diharapkan apa yang dilakukan Yayasan Intan Maharani dapat berkesinambungan dan memiliki kontribusi lebih besar di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

- <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Herlina, A. (2014). Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang. *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Sekretariat*, 5, 145–155.
- Julien, G. (2024). The Phenomenon of Street Children and The Complexity in Reforming Their Lives Through Inclusive Education. *International Journal Papier Public Review*, 5(4), 41–54. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v5i4.330>
- Mugianti, S., Winarni, S., & Pangestuti, W. D. (2018). Faktor Penyebab Remaja Menjadi Anak Jalanan. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.31290/jpk.v7i1.292>
- Ogunkan, D. V. (2025). The dynamics of street children in Nigerian cities: the significance of age and gender. *Journal of Gender Studies*, 34(4), 465–482. <https://doi.org/10.1080/09589236.2024.2376428>
- Pertiwi, R., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & Firmanto, A. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 92–109. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4303>
- Setiawan, A. M. I., Mahsyar, A., & Mustari, N. (2023). Pelaksanaan Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Makassar. *Journal Unismuh*, 4, 1033–1147.
- Syahri, & Mustika Widyastuti, S. (2023). Collaborative Governance for Development and Empowerment of Street Children and Beggars in The City of Palembang. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 15(1), 241–249. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publika/article/view/24915/pdf>
- Walopka, Y., Ndoen, M. L., & Suwartiningsih, S. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Anak Jalanan Di Kota Jayapura, Distrik Jayapura Selatan. *Kritis*, 27(2), 92–106. <https://doi.org/10.24246/kritis.v27i2p92-106>